



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 29079208-29079205
<http://www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/>

Nomor : 848/DJMT/OT1.6/VII/2025 Jakarta, 31 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Peningkatan Pelayanan Peradilan
di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kepada Yth:

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 2. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
- Di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 363/DJMT/ OT.01.4/VII/2025 Penyelenggaraan Dan Penunjukan Panitia Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 Tanggal 29 Juli 2025 serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan kegiatan Penilaian Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun kategori penilaian untuk kegiatan tersebut antara lain:

1. Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - a. Dasar Penilaian:
SK Dirjen Badilmiltun No 109/DJMT/KEP/VII/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara
 - b. Kriteria Penilaian:

No.	KRITERIA	SKOR	CATATAN TIM PENILAI
1	CCTV yang terpasang pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengadilan telah memantau seluruh area PTSP. CCTV dapat memperlihatkan dengan jelas : <ul style="list-style-type: none">- Fasilitas tunggu untuk pengguna layanan;- Meja Petugas;- Jam Layanan- Perangkat Survei- Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas- Maklumat Pelayanan;- Maklumat Pelayanan Informasi Publik;	10	



	- Kompensasi Petugas PTSP - Banner atau media lainnya terkait dengan “anti gratifikasi” dan “informasi pengaduan” di lokasi pelayanan publik.		
2	Hasil Survei (SPAK, SKM, dan Survei Harian) serta tindak lanjut periode Tahun 2024 yang terpublikasi di website pengadilan	10	
3	Publikasi Maklumat Pelayanan pada media elektronik;	5	
4	Publikasi Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada media elektronik;	5	
5	Interaksi melalui media sosial Pengadilan (Instagram, Facebook, X (twitter), dll), berupa postingan layanan Pengadilan maupun percakapan dengan pencari keadilan;	10	
6	Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang pelaksana layanan PTSP;	10	
7	Standar Layanan yang sudah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);	10	
8	Hasil pengawasan secara berkala oleh Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) periode bulan Januari s.d Juni 2025;	10	
9	Hasil monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) periode bulan Januari s.d Juni 2025;	10	
10	Dokumentasi pelatihan Petugas untuk memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas;	10	
11	Manfaat dan keberlanjutan inovasi yang dimiliki oleh pengadilan.	10	
	TOTAL NILAI	100	

2. Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan

a. Dasar Penilaian:

1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 248/DJMT/B/OT.01.2/II/2025 Perihal: Perubahan Alamat Elektronik (Email) untuk Pengiriman Laporan Bulanan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 25 Februari 2025;
2. Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1429/Djmt.3/B/ 12/2018 tentang Laporan Bulanan Perkara tanggal 3 Desember 2018;
3. Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019.

b. Cakupan Penilaian:

Pelaporan Perkara Bulan Juli 2024 s.d. Bulan Juni Tahun 2025

c. Kriteria Penilaian:

Kriteria Penilaian Pelaporan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



NO	KRITERIA	SKOR	CATATAN TIM PENILAI
1.	Pembinaan Pengawasan PTTUN atas Laporan Satuan Kerja (Juli 2024 s.d. Juni 2025)	40	
2.	Ketepatan Waktu Pengiriman Laporan Hardcopy dan Email (Juli 2024 s.d. Februari 2025)	48	
3.	Ketepatan Waktu Pengiriman Laporan melalui Aplikasi ELAP (Maret s.d. Juni 2025)	24	
4.	Kepatuhan PTTUN dalam meverifikasi laporan PTUN di Bawahnya pada Aplikasi E-LAP (Maret s.d. Juni 2025)	24	
5.	Substansi Laporan Keuangan Perkara dan Komdanas Biaya Perkara, Evaluasi Pelaporan, serta Tindak Lanjutnya (Juli 2024 s.d. Juni 2025)	10	
6.	Substansi Laporan Perkara, Evaluasi Pelaporan, serta Tindak Lanjutnya (Juli 2024 s.d. Juni 2025)	62	
7.	Kerapian Pemberkasan Laporan Hardcopy (Juli 2024 s.d. Februari 2025)	10	
	TOTAL NILAI	PTUN (218 x0,458715596) = 100	

Kriteria Penilaian Pelaporan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

NO	KRITERIA	SKOR	CATATAN TIM PENILAI
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman Laporan Hardcopy dan Email (Juli 2024 s.d. Februari 2025)	32	
2.	Ketepatan Waktu Pengiriman Laporan melalui Aplikasi ELAP (Maret s.d. Juni 2025)	24	
3.	Substansi Laporan Keuangan Perkara dan Komdanas Biaya Perkara, Evaluasi Pelaporan, serta Tindak Lanjutnya (Juli 2024 s.d. Juni 2025)	10	
4.	Substansi Laporan Perkara, Evaluasi Pelaporan, serta Tindak Lanjutnya (Juli 2024 s.d. Juni 2025)	82	
5.	Kerapian Pemberkasan Laporan Hardcopy (Juli 2024 s.d. Februari 2025)	10	
	TOTAL NILAI	PTUN (158 x0,632911392) = 100	



3. Penilaian Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan

a. Dasar Penilaian:

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Kriteria Penilaian:

Kriteria Penilaian Untuk Pengadilan Tingkat Banding

NO	INDIKATOR	SKOR	CATATAN TIM PENILAI
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25	
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	25	
3.	Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	25	
4.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	25	
TOTAL NILAI		100	

Kriteria Penilaian Untuk Pengadilan Tingkat Pertama

NO	INDIKATOR	SKOR	CATATAN TIM PENILAI
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	20	
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	15	
3.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	10	
4.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	15	
5.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10	
6.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	10	
7.	Persentase putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	
TOTAL NILAI		100	



4. Penilaian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Posbakum, Prodeo dan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan)

a. Dasar Penilaian:

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 80/Djmt/Kep/OT.01.1/V/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
- Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

b. Kriteria Penilaian:

NO	INDIKATOR	SKOR	CATATAN TIM PENILAI
	POSBAKUM		
1	Publikasi dan sosialisasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan kepada pihak internal maupun eksternal	5	
2	Tersedia banner/brosur/pamflet/media informasi lainnya tentang : a. Informasi layanan POSBAKUM bebas biaya; b. Informasi jam layanan POSBAKUM; c. Informasi daftar Advokat piket; d. Informasi daftar organisasi LBH/Advokat yang memberikan bantuan hukum.	5	
3	Proses seleksi LBH/Advokat pada POSBAKUM;	5	
4	Pembinaan POSBAKUM oleh Panmud Hukum;	5	
5	Laporan dan Monev setiap bulan (6 bulan terakhir);	5	
6	Kepatuhan pengadilan dalam pengiriman pelaporan elektronik setiap bulannya periode Januari 2024 -Juni 2025	5	
7	Realisasi capaian target di Tahun 2024;	5	
8	Realisasi capaian target sampai dengan Triwulan II periode Tahun 2025	5	
	PRODEO		
1	Publikasi dan sosialisasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan kepada pihak internal maupun eksternal	5	
2	Tersedia banner/brosur/pamflet/media informasi lainnya tentang Prodeo	5	
3	Laporan dan Monev setiap bulan (6 bulan terakhir);	5	
4	Kepatuhan pengadilan dalam pengiriman pelaporan elektronik setiap bulannya periode Januari 2024 -Juni 2025	5	
5	Realisasi capaian target di Tahun 2024;	5	
6	Realisasi capaian target sampai dengan Triwulan II periode Tahun 2025	5	



SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN			
1	Publikasi dan sosialisasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan kepada pihak internal maupun eksternal	5	
2	Eviden koordinasi pengadilan dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sosialisasi layanan hukum bagi masyarakat	5	
3	Pengecekan dokumen pelaksanaan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan hukum secara berkala	5	
4	Kepatuhan pengadilan dalam pengiriman pelaporan elektronik setiap bulannya periode Januari 2024-Juni 2025	5	
5	Realisasi capaian target di Tahun 2024;	5	
6	Realisasi capaian target sampai dengan Triwulan II periode Tahun 2025	5	
TOTAL NILAI		100	

5. Penilaian Monitoring Informasi SPP (MIS) Pengadilan

a. Dasar Penilaian:

Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Register Elektronik (E-Register) Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

b. Kriteria Penilaian:

NO	INDIKATOR	SKOR	CATATAN TIM PENILAI
1.	Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah rasio penanganan perkara ▪ Rilis Versi SIPP 	10	
2.	Kepatuhan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendaftaran Perkara Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam ▪ Penetapan Hakim Kepatuhan penetapan Majelis/Hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja. ▪ Penetapan PP Kepatuhan penetapan Panitera Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja. ▪ Penetapan Jurusita Kepatuhan penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja. ▪ Penetapan Hari Sidang Pertama Kepatuhan penetapan Hari Sidang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja. ▪ Penginputan Putusan Akhir Kepatuhan waktu dalam input Putusan dalam waktu 1x24 jam. Sumber data diambil dari data SIPP Satker dan SIPP MA. 	30	



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minutasi Perkara Ketepatan waktu minutasi maksimal waktu 7 (tujuh) hari. BHT Perkara ▪ Ketepatan waktu dalam melaksanakan proses BHT dalam waktu 14 (empat belas) hari. ▪ Pengiriman Berkas Banding Kepatuhan waktu pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari. ▪ Pengiriman Berkas Kasasi Kepatuhan waktu pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 65 (enam puluh lima) hari. ▪ Pengiriman Berkas PK Kepatuhan waktu pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari sesudah Jawaban Termohon PK (pihak lawan). 		
3.	<p>Kelengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ E-Doc Court Calender ▪ E-Doc Gugatan ▪ E-Doc Gugatan Perbaikan ▪ E-Doc Jawaban ▪ E-Doc Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ▪ E-Doc Berita Acara Sidang ▪ E-Doc Penetapan Putusan Sela ▪ E-Doc Putusan Tk.Pertama ▪ E-Doc Kasasi SIAP MA RI ▪ E-Doc Perbaikan Kasasi ▪ E-Doc PK SIAP MA RI ▪ E-Doc Perbaikan PK 	30	
	<p>Kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agenda Sidang Terakhir Kesesuaian Agenda Sidang Terakhir dengan status perkara putus. ▪ Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir Kesesuaian Tanggal Sidang Terakhir dengan Tanggal Putusan ▪ Pengisian BHT Ada Atau Tidaknya Pencatatan BHT pada suatu perkara ▪ Sisa Biaya Perkara Tingkat Pertama Sisa panjar yang belum dikembalikan dan melewati waktu pengembalian. ▪ Sisa Biaya Perkara Tingkat Banding Sisa panjar yang belum dikembalikan dan melewati waktu pengembalian ▪ Sisa Biaya Perkara Kasasi Sisa panjar yang belum dikembalikan dan melewati waktu pengembalian. ▪ Sisa Biaya Perkara PK Sisa panjar yang belum dikembalikan dan melewati waktu pengembalian • Pelaksanaan Sinkronisasi dan Backup Data SIPP dan Pusdadiltun 	30	
	TOTAL NILAI	100	



6. Penilaian Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada *Website* Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

a. Dasar Penilaian:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

b. Kriteria Penilaian:

INDIKATOR	DESKRIPSI	NILAI MAKS	TOTAL MAKS
1. PRINSIP DAN PEDOMAN DASAR			50
a) Aksesibilitas	Memudahkan pengguna dalam mencari informasi, misalnya: menu yang mudah diakses oleh pengguna termasuk pengguna disabilitas	10	
b) Alamat Website	Kewajiban menggunakan nama domain go.id	5	
c) Struktur Website	Mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam Pedoman Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, termasuk mengakomodir kebutuhan disabilitas	15	
d) Isi Website	Berita <i>Up to date</i> , Menampilkan informasi seputar kegiatan pengadilan dan pelayanan publik serta informasi pembangunan ZI	10	
e) Fungsi Dekorasi dan Kreativitas Website	Penggunaan elemen Ciri khas daerah tiap-tiap provinsi pengadilan	5	
f) Aplikasi Pengembangan Website	Update Keamanan Website sesuai dengan Framework yang digunakan	5	
2. PEDOMAN LAYOUT TEMPLATE WEBSITE PENGADILAN			40
a) Menggunakan Template	Standar warna Peradilan TUN Web color : #0e29cd	5	
b) Penggunaan HTML 5 dalam template	Ukuran file/data, elemen Template, Layout Halaman lanjutan, Halaman isi Menu Navigasi	5	
c) Pedoman Pengaturan Data isi Website	Beranda, Tentang Pengadilan, Layanan Publik, Layanan Hukum, Berita, Hubungi Kami	10	
d) Pedoman Menu Layanan Informasi Publik	Beranda, Tentang Pengadilan, Profile Pengadilan, Kepaniteraan, Sistem Pengelolaan Pengadilan, Kegiatan Pengadilan, Survei Pelayanan Publik	10	
e) Pedoman Penggunaan Animasi	Penggunaan animasi yang simple dan tidak membebani <i>storage</i> website	5	



f) Pedoman Dekorasi Website	Kata kunci dan frasa, title tag, gunakan title tag yang singkat dan jelas, heading tags, Link dengan website terkait, Tag Link teks, Meta Description Tag, Konten/Isi	2,5	
g) <i>Search Engine Optimization (SEO)</i>	Kemudahan mencari dalam mesin pencarian	2,5	
2. PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE			
a) SK Tim Pengelola Website Pengadilan		3	10
b) Cek penggunaan nama domain dan hosting/provider Website		3	
c) Telah dilakukan Monev dan Tindaklanjut dalam Pengelolaan Website di Pengadilan		4	

Untuk eviden kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan dapat dikirimkan melalui link <https://s.djmt.id/EvidenPPP2025> paling lambat tanggal 25 September 2025. Adapun eviden yang dikirimkan oleh satuan kerja adalah untuk:

1. Penilaian Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Penilaian Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan
3. Penilaian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Posbakum, Prodeo dan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan)

Sehubungan dengan hal di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdri. Meylan, S.Sos., M.M. (Kasi Tata Kelola Ditbinganistun) melalui nomor HP/WA: 0818954243.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

